

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk sangat tinggi. Pada tahun 2013 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 250 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,49 persen per tahun. Bahkan menurut Kepala BKKBN, Fasli Jalal menyatakan bahwa Indonesia merupakan penyumbang jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat (<http://www.republika.co.id>, 2013). Tetapi sayangnya jumlah penduduk yang tinggi itu tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Persaingan yang begitu ketat dalam seleksi pekerjaan dan banyaknya orang yang bersaing dalam mencari pekerjaan membuat jumlah pengangguran semakin banyak. Belum lagi perusahaan-perusahaan yang mulai mengurangi jumlah pekerjanya menambah daftar panjang jumlah pengangguran saat ini, dan tidak menutup kemungkinan jumlahnya akan semakin meningkat setiap tahunnya.

Ironisnya bukan hanya orang-orang dari kalangan yang tidak berpendidikan saja yang sulit mencari pekerjaan bahkan hal ini juga dialami oleh orang-orang dari kalangan berpendidikan. Padahal pendidikan selama ini oleh masyarakat kita dipercaya sebagai modal utama untuk meraih kehidupan yang lebih baik, salah satunya dalam hal mendapat pekerjaan. Namun nyatanya pendidikan tinggi belum menjamin seseorang bisa langsung mendapat pekerjaan sesuai harapannya.

Kondisi ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan, sebab pendidikan yang diharapkan mampu menciptakan manusia-manusia unggul, bukan hanya dalam penguasaan ilmu tetapi juga kesiapan untuk memasuki dunia kerja ternyata belum terealisasikan secara optimal. Tabel 1.1 berikut ini merupakan data tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi di Indonesia yang ditamatkan berdasarkan data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) :

Tabel 1.1
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2010–2013 (dalam jiwa)

No.	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2010	2011	2012	2013
1.	Tidak/belum pernah sekolah	157 586	190 370	82 411	77 450
2.	Belum/tidak tamat SD	600 221	686 895	503 379	477 156
3.	SD	1 402 858	1 120 090	1 449 508	1 339 072
4.	SLTP	1 661 449	1 890 755	1 701 294	1 681 945
5.	SLTA Umum	2 149 123	2 042 629	1 832 109	1 925 563
6.	SLTA Kejuruan	1 195 192	1 032 317	1 041 265	1 259 444
7.	Diploma I,II,III/Akademi	443 222	244 687	196 780	187 059
8.	Universitas	710 128	492 343	438 210	441 048
	Jumlah	8 319 779	7 700 086	7 244 956	7 388 737

Sumber: bps.go.id

Dari data pada Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka setiap tahunnya berfluktuatif. Tetapi data terakhir yaitu tahun 2012-2013 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di beberapa jenjang pendidikan mengalami penurunan yaitu lulusan Sekolah Dasar (SD) turun sebesar 110.436 orang, Sekolah Menengah Pertama(SMP) turun sebesar 19.349 orang, dan Diploma turun sebesar 9.721 orang. Namun hal sebaliknya justru terjadi peningkatan di tingkatan sekolah menengah yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 93.454 orang dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 218.179 orang serta Universitas sebesar 2.838 orang. Jika dilihat dari data tersebut, lulusan Pendidikan Menengah ke atas, baik Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih mendominasi jumlah pengangguran di Indonesia.

Badan Pusat Statistik juga merilis Data Strategis 2013, yang diantaranya mengungkap tentang kondisi ketenagakerjaan di seluruh Provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi dengan angka pengangguran terbuka yang menyumbang jumlah pengangguran terbanyak di Indonesia.

Tabel 1.2
Provinsi dengan Tingkat Pengangguran Tertinggi di Indonesia
Tahun 2013

Nomor	Provinsi	Pengangguran Orang	Tingkat Pengangguran (%)
1	Banten	552.900	10,10
2	DKI Jakarta	513.170	9,94
3	Jawa Barat	1.815.27	8,90
4	<u>Kalimantan Timur</u>	167.610	8,87
5	<u>Aceh</u>	177.830	8,38
6	<u>Sulawesi Utara</u>	78.330	7,19
7	<u>Maluku</u>	48.070	6,73
8	<u>Kepulauan Riau</u>	60.670	6,39
9	<u>Sumatera Barat</u>	151.260	6,33
10	<u>Sumatera Utara</u>	387.870	6,01

Sumber: www.bisnis.com

Dari data tersebut, Badan Pusat Statistik menempatkan Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi ketiga, setelah Banten dan DKI Jakarta, yakni 8,90%. Peringkat ini tidak mengalami perbaikan sejak setahun lalu meski angkanya turun dari 9,78% (www.bisnis.com, 2013). Lebih spesifik lagi jumlah pengangguran di Jawa Barat dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan sebagai berikut :

Tabel 1.3
Penduduk Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Menurut Pendidikan Tingkat Provinsi Jawa Barat

Pendidikan	Bekerja		Pengangguran		Total		TPT (%)
	(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)	
<= SD	9.077.280	49,30	621.175	33,21	9.698.455	47,81	6,40
SMP	3.326.151	18,06	515.788	27,57	3.841.939	18,94	13,43
SMA Umum	2.707.934	14,71	365.394	19,53	3.073.328	15,15	11,89
SMA Kejuruan	1.743.561	9,47	277.221	14,82	2.020.782	9,96	13,72
Diploma I/II/III	478.221	2,60	31.117	1,66	509.338	2,51	6,11
Universitas	1.080.837	5,87	59.954	3,20	1.140.791	5,62	5,26
Total	18.413.984	100	1.870.649	100	20.284.633	100	9,22

Sumber : Sakernas 2013

Jika dilihat dari persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2013, SMK menjadi penyumbang terbesar pengangguran di Jawa Barat mencapai 13,72%. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan melihat karakter khusus yang dimiliki SMK dalam menghasilkan lulusan yang siap kerja. Dimana kurikulum dan program pendidikan di SMK memang telah dirancang untuk membekali siswanya dengan keterampilan dan keahlian khusus sesuai bidang yang diambil oleh siswa tersebut.

Seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010–2014 (Depdiknas, 2010:104) yang menetapkan bahwa lulusan SMK lebih diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dunia kerja serta dunia usaha dan industri. Pada kenyataannya rencana strategis Depdiknas ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Terbukti dari tingginya jumlah pengangguran yang dihasilkan oleh lulusan SMK dibandingkan dengan lulusan dari jenjang pendidikan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan yang diterapkan di sekolah belum mampu menghasilkan kompetensi lulusan yang sesuai dengan permintaan industri. Oleh karena itu perlu adanya alternatif lain agar para lulusan tidak bergantung pada pekerjaan dari orang lain melainkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri yaitu melalui jalan kewirausahaan.

Kewirausahaan sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui pemikiran kreatif dan tindakan inovatif. Pengertian ini mengandung arti bahwa seorang wirausaha adalah orang yang memiliki kemampuan berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan sesuatu yang baru atau mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya.

Peran kewirausahaan ini sangat penting bagi kehidupan sosial-ekonomi suatu negara. Seperti yang dikemukakan oleh Baumol, *et al.* (Sarwoko, 2011:126) kewirausahaan adalah kunci untuk sejumlah hasil-hasil sosial yang diinginkan, termasuk pertumbuhan ekonomi, pengangguran yang lebih rendah, dan modernisasi teknologi. Mengingat pentingnya kewirausahaan tersebut maka diperlukan upaya untuk mengembangkan jiwa dan perilaku kewirausahaan pada diri setiap individu. Pengembangan kewirausahaan tersebut tentunya tidak

terlepas dari peran masyarakat. Yusof, Permula, dan Pangil (Frinces, 2011: 2) mengungkapkan bahwa ada empat alasan mengapa para wirausaha penting di dalam masyarakat, yaitu:

1. Untuk mendayakan faktor-faktor produksi seperti tanah, modal, teknologi, informasi dan berbagai sumber daya manusia (SDM) di dalam memproduksi tugas-tugas yang efektif.
2. Mengidentifikasi berbagai peluang di dalam lingkungan dengan meningkatkan aktivitas yang akan memberikan manfaat kepada setiap orang
3. Untuk memilih pendekatan yang terbaik dalam mendayagunakan semua faktor produksi agar supaya meminimalisir pemborosan di dalam berbagai kegiatan kewirausahaan
4. Untuk kemanfaatan generasi mendatang

Namun realita memperlihatkan bahwa tak sedikit masyarakat yang masih belum sepenuhnya menyadari akan pentingnya peran kewirausahaan. Padahal menurut Singh (2008) (Rahayu, *et al.*, 2011:329) bahwa di abad ke-21 ini para pengusaha/wirausahawan berperan sentral menjadi agen perubahan dan kemajuan suatu masyarakat. Kewirausahaan dipandang sebagai instrumen dalam menggerakkan masyarakat dan ekonomi untuk lebih maju dimasa depan.

Oleh karena itu perlu menumbuhkan budaya kewirausahaan pada masyarakat agar kewirausahaan menjadi bagian dari etos kerja masyarakat, sehingga dapat melahirkan wirausahawan-wirausahawan baru yang handal, tangguh dan mandiri yang mampu bersaing di era globalisasi seperti saat ini. Salah satu cara yang bisa ditempuh yaitu dengan menanamkan nilai-nilai kewirausahaan sejak dini melalui pendidikan kewirausahaan.

Pendidikan kewirausahaan sangat penting artinya dalam menumbuhkan keinginan berwirausaha. Menurut Kourilsky dan Walstad (1998) (Andika dan Madjid, 2012) pendidikan kewirausahaan telah dipertimbangkan sebagai salah satu faktor penting untuk menumbuhkan dan mengembangkan hasrat, jiwa, dan perilaku berwirausaha di kalangan generasi muda. Dengan diberikannya bekal ilmu kewirausahaan ini mereka diarahkan agar mampu membentuk karakter pribadi yang mandiri, kreatif, dan inovatif. Sehingga mereka tidak hanya mengandalkan pekerjaan dari orang lain saja melainkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Pentingnya pendidikan kewirausahaan ini pun

dikemukakan oleh Holt (Rahmawati, 2000) yang mengatakan bahwa paket pendidikan kewirausahaan akan membentuk siswa untuk mengejar karir kewirausahaan (Wijaya, 2007:120). Sejalan dengan pendapat tersebut, Alma (2009:7) menyatakan bahwa keberanian membentuk kewirausahaan didorong oleh guru sekolah, sekolah yang memberikan mata pelajaran kewirausahaan yang praktis dan menarik dapat membangkitkan minat siswa untuk berwirausaha.

Oleh karena itu sekolah menjadi sarana yang tepat untuk mendidik anak-anak menjadi seorang wirausahawan. Hal ini dikarenakan sebagian besar waktu anak-anak dihabiskan disekolah. Selain itu, menurut Sunhadji (Fatimah, 2013:5) ada beberapa alasan sekolah formal dapat menumbuhkan bakat wirausaha, yaitu:

Pertama, sekolah adalah lembaga pendidikan yang sangat dipercaya masyarakat untuk masa depan yang lebih baik. Kedua, jaringan sudah ada di seluruh pelosok negeri. Ketiga, melalui sekolah juga bisa menjangkau dan mempengaruhi keluarga anak didik.

Upaya pengembangan pendidikan kewirausahaan juga telah diprogramkan pada salah satu lembaga pendidikan nasional yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Terlebih sejak tahun 1994 pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional mulai menerapkan standarisasi kurikulum pada seluruh SMK, yaitu kewajiban mengajarkan mata pelajaran kewirausahaan pada siswanya (Depdiknas, 2011). Lebih lanjut dijelaskan dalam GBPP (Depdiknas, 2004: 6) tujuan utama SMK antara lain:

1. Menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap profesionalisme.
2. Menyiapkan siswa agar mampu memilih karir, berkompotensi dan mampu mengembangkan diri.
3. Menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan Industri baik pada saat ini maupun pada saat yang akan datang.
4. Menyiapkan tamatan agar menjadi warga Negara produktif, adaptif dan kreatif.

Berdasarkan konteks diatas, siswa SMK memang telah dipersiapkan untuk memasuki lapangan pekerjaan baik melalui jenjang karir menjadi tenaga kerja maupun menjadi mandiri dengan berwirausaha. Hal ini sejalan dengan pendapat Puspitasari (2006:3) dalam bukunya bahwa tujuan dari diajarkannya pendidikan

kewirausahaan pada sekolah kejuruan dan ditanamkan sikap-sikap dan perilaku untuk membuka bisnis agar menjadi wirausahawan yang berbakat sehingga mampu mensejahterakan kehidupan sendiri dan orang lain.

Terkait dengan tujuan tersebut maka pihak sekolah memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendidik dan memberikan kemampuan wirausaha kepada siswa. Untuk itu pihak sekolah perlu menerapkan pola pembelajaran kewirausahaan yang kongkrit, bukan hanya sekedar teori-teori belaka melainkan harus ada penerapan dari teori-teori tersebut. Sehingga nantinya ilmu tersebut bisa membekali siswa dengan kemampuan *life skills* yang berguna bagi siswa agar dapat hidup mandiri dan *survive* di lingkungannya. Seperti yang dikemukakan Budiningsih (Fatimah, 2013:7) empat prinsip penting dalam menjalankan pembelajaran kewirausahaan sebagai *life skills* (kecakapan hidup) yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu :

Learning to know (belajar untuk mengetahui kewirausahaan), *learning to do* (belajar untuk melakukan kegiatan wirausaha), *learning to be* (belajar untuk mempraktekkan kegiatan wirausaha), dan *learning to live together* (belajar untuk bersama dengan yang lain dalam interaksi sosial dalam berwirausaha).

Hal tersebut bisa dilakukan dengan mengintegrasikan pendidikan kewirausahaan ke seluruh aspek pembelajaran di sekolah. Artinya, guru dalam mengajar harus bisa mengaitkan apa yang diajarkannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan kewirausahaan dan mampu menerapkannya ke dalam kegiatan pembelajaran sehingga lambat laun akan tertanam di *mindset* siswa tentang kewirausahaan, yang pada akhirnya bisa menumbuhkan keinginan siswa untuk berwirausaha. Keinginan ini oleh Fishbein dan Ajzen (1975) disebut sebagai intensi yaitu komponen dalam diri individu yang mengacu pada keinginan untuk melakukan tingkah laku tertentu (Wijaya, 2007:118). Sehingga intensi berwirausaha dapat diartikan sebagai keinginan seseorang untuk melakukan tindakan wirausaha. Menurut Fayolle, Gailly & Lassas-Clerc (2006) (Silvia, 2013), intensi kewirausahaan berperan penting untuk membentuk individu menjadi seorang *entrepreneur*.

Namun dari hasil penelitian Hartini (2002) menyatakan bahwa sampai saat ini di antara siswa lulusan SMK tidak banyak yang berorientasi dan berniat untuk bekerja sendiri atau berwirausaha dengan bekal ilmu pengetahuan yang telah diperoleh (Wijaya, 2007:117). Lebih lanjut Wijaya (2007: 118) menjelaskan ada beberapa hal mengapa siswa SMK yang tidak tertarik berwirausaha setelah lulus adalah karena tidak mau mengambil resiko, takut gagal, tidak memiliki modal dan lebih menyukai bekerja pada orang lain. Hal ini tentu saja bertentangan dengan tujuan dari SMK itu sendiri untuk menciptakan lulusan yang memiliki keterampilan dan keahlian sebagai bekal berwirausaha nanti.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait intensi kewirausahaan dengan judul penelitian “**Intensi Kewirausahaan (Studi Deskriptif pada Siswa SMK Negeri Kota Bandung)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran umum intensi kewirausahaan siswa SMK Negeri Kota Bandung ?
2. Bagaimana gambaran intensi kewirausahaan siswa SMK Negeri Kota Bandung ditinjau dari aspek karakteristik kepribadian yang meliputi *need for achievement*, *locus of control* dan *self-efficacy*?
3. Bagaimana gambaran intensi kewirausahaan siswa SMK Negeri Kota Bandung ditinjau dari aspek karakteristik demografis yang meliputi gender, pendidikan dan pengalaman praktek kerja?
4. Bagaimana gambaran intensi kewirausahaan siswa SMK Negeri Kota Bandung ditinjau dari aspek karakteristik lingkungan yang meliputi akses kepada modal, informasi dan jaringan sosial?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran umum intensi kewirausahaan siswa SMK Negeri Kota Bandung ?
2. Untuk mengetahui gambaran intensi kewirausahaan siswa SMK Negeri Kota Bandung ditinjau dari aspek karakteristik kepribadian yang meliputi *need for achievement, locus of control* dan *self-efficacy*?
3. Untuk mengetahui gambaran intensi kewirausahaan siswa SMK Negeri Kota Bandung ditinjau dari aspek karakteristik demografis yang meliputi gender, pendidikan dan pengalaman praktek kerja?
4. Untuk mengetahui gambaran intensi kewirausahaan siswa SMK Negeri Kota Bandung ditinjau dari aspek karakteristik lingkungan yang meliputi akses kepada modal, informasi dan jaringan sosial ?

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khasanah dalam ilmu ekonomi khususnya di dalam kewirausahaan.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran serta informasi mengenai intensi kewirausahaan siswa SMK di kota Bandung. Hal ini dapat berguna bagi pemerintah dalam menetapkan program pendidikan kewirausahaan dan bagi praktisi dalam melakukan pelatihan serta pembinaan wirausaha baru.